

Marisa , AKIBAT HUKUM PEMAKAIAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN  
PADA POKOKNYA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pembimbing : Adi Suliantoro, S.H.,M.H

Program Studi : Ilmu Hukum , Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank

(UNISBANK) Semarang

### **ABSTRAKS**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsekuensi dan akibat hukum dari penggunaan merek yang memiliki persamaa pada pokoknya dengan merek lain. Analisis yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan sebagai acuan utama dari analisis.

UU No 20 Tahun 2016 mengungkapkan tentang beberapa prinsip dalam perlindungan merek dagang yaitu melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek akan memberikan implikasi akan diperolehnya perlindungan merek setidaknya selama 10 tahun. Pendaftaran merek yang dapat diterima harus memenuhi beberapa syarat. Sistem pendaftaran merek menggunakan prinsip first to file yang berarti pendaftar pertama adalah yang berhak atas merek. Adanya persamaan merek pada pokoknya yang digunakan oleh satu pihak dapat dikenakan tuntutan hukum. UU No. 20 Tahun 2016 memberikan tiga alternatif penanganan sengketa merek yaitu melalui jalur hukum perdata dengan akibat hukum berupa ganti rugi dan pembatalan pendaftaran merek. Jalur hukum pidana dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 2 milyar rupiah. Jalur arbitrase adalah penyelesaian di luar hukum.

Kata kunci: Akibat hukum, merek, persamaan pada pokoknya.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences and consequences of using a brand that has similarities in essence with other brands. Normative juridical analysis is used in this study. Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications is used as the main reference for the analysis.

Law No. 20 of 2016 reveals several principles in the protection of trademarks, namely through trademark registration. Brand registration will have implications for obtaining trademark protection for at least 10 years. Acceptable trademark registration must meet several conditions. The trademark registration system uses the first to file principle, which means that the first registrant is the one who has the right to the mark. The existence of a trademark similarity that is basically used by one party can be subject to lawsuits. UU no. 20 of 2016 provides three alternatives for handling trademark disputes, namely through civil law with legal consequences in the form of compensation and cancellation of trademark registration. The criminal law path is punishable by a maximum imprisonment of 4 years and or a maximum fine of 2 billion rupiah. Arbitration is a settlement outside the law.

Keywords: Legal consequences, brand, equality in essence.